

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kajian Teoris

1. Pengertian Peran

Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran diartikan sebagai bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan dalam adegan film, sandiwara, dengan berusaha bermain baik dan secara aktif dibebankan kepadanya.¹⁵Sedangkan menurut Merton peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang yang menduduki status tertentu, dalam hal ini juga berkaitan dengan hubungan berdasarkan peran yang dimiliki seseorang yang menduduki status social tertentu.

Peran sebuah gambaran interaksi social dalam terminologi actor-aktor yang bermain sesuai yang telah ditetapkan, berdasarkan dengan teori ini harapan dari menjadi pemahaman bersama yang menentukan individu untuk berperilaku dalam kesehariaannya, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, guru, mahasiswa, orang tua, laki-laki

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka,2014)

ataupun perempuan diharapkan seseorang yang mempunyai peran tersebut berperilaku sesuai dengan perannya.¹⁶Selain itu lingkungan organisasi juga dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka, harapan tersebut berupa norma ataupun tekanan untuk bertindak dalam cara tertentu sehingga individu tersebut akan menerima peran tersebut serta merespon dengan berbagai cara.¹⁷

Arti peran yang merupakan aspek dinamis kedudukan. Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang. Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran setiap orang berbeda. Peran merupakan sekumpulan harapan yang dibebankan kepada seseorang individu atau kelompok yang sedang menempati kedudukan social tertentu. Harapan tersebut bisa timbul dari masyarakat ataupun yang sedang menduduki posisi tersebut.

Apabila seseorang sudah melakukan hak serta kewajiban didalam kedudukan ia miliki, berarti ia sedang menjalankan peran. Adanya peran dihasilkan dari banyak sekali latar belakang, peran dan kedudukan dua aspek yang tidak mungkin terpisahkan. Adanya peran berarti kedudukan sudah mendasari setiap tindakan atau peran yang dihasilkan sesuai kesempatan yang dalam suatu masyarakat kepadanya. Hakekatnya peran

¹⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hal 219

¹⁷ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama , 2001), hal 11

juga dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Sutaro mengemukakan bahwa peran terdiri dari tiga komponen yaitu sebagai berikut :

- a. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan situasi-situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia harus bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi social akan terjalin kesnambungan dan kelancarannya.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut :¹⁸

- a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2013),hal 212

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota –anggota yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan oleh masyarakat berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimiliki seseorang atau sekumpulan orang tersebut.

2. Peran Koperasi

Keberadaan koperasi di Indonesia memiliki peran penting bagi setiap lembaga dan anggota yang menjalankannya, salah satunya membangun perekonomian. Berikut adalah beberapa peran koperasi dalam perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Membangun Kegiatan Usaha Masyarakat

Koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh petani yang dibutuhkan oleh petani. Dengan adanya koperasi tersebut, maka petani bisa membeli kebutuhan ala-alat pertanian di koperasi dengan harga yang lebih murah. Karena

itu, kegiatan usaha pertanian tersebut bisa menjadi lebih baik dan meningkat.

b. Meningkatkan Pendapatan Anggota

Anggota koperasi bisa mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh koperasi sehingga bisa mendapatkan keuntungan. Hal ini karena semakin besar jasa seorang anggota terhadap koperasi, maka semakin besar pula penghasilan yang diperoleh oleh anggota.¹⁹

c. Mengurangi Tingkat Pengangguran

Kehadiran koperasi di Indonesia diharapkan bisa menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan, karena dengan adanya koperasi akan dibutuhkan banyak pekerjaan untuk mengelola usahanya. Setiap orang juga bisa belajar mengelola keuangan dan mendapatkan penghasilan setiap bulan dari pengelolaan koperasi ini. Pada dasarnya koperasi bisa member kesempatan kepada tenaga kerja dan menyerap sumber daya manusia.

d. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat

Kegiatan koperasi bisa meningkatkan penghasilan para anggota koperasi. Ini berarti peran koperasi bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan memperoleh penghasilan yang tinggi, kemungkinan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup yang

¹⁹Anduru Timur Harsanto, *Peran Koperasi Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional...*, hal

beraneka ragam, dan sebagai alat perjuangan ekonomi untuk bisa bersaing dengan badan usaha lainnya.²⁰

e. Turut Mencerdaskan Bangsa

Usaha koperasi bukan hanya kegiatan dibidang material atau jasa saja, tapi juga mengadakan kegiatan pendidikan terhadap para anggotanya. Pendidikan tersebut antara lain diberikan dalam bentuk pelatihan ketrampilan serta manajemen bisnis dan keuangan. Dengan begitu, peran koperasi dalam menceerdaskan kehidupan bangsa juga sudah sangat terbukti dengan mengamalkan pengetahuan kepada anggota dan masyarakat.

f. Membangun Tatanan Perekonomian Nasional

Koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa dan dikembangkan oleh pemerintah, perlu dikembangkan bersama kegiatan usaha lainnya. Dengan memberdayakan koperasi, berarti juga bisa memberdayakan masyarakat, yang pada akhirnya akan mampu memberdayakan perekonomian nasional.²¹

Agar koperasi dapat mewujudkan perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat maka koperasi perlu melaksanakan usaha disegala bidang kehidupan ekonomi masyarakat, usaha koperaso terutama diarahkan pada bidang yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun untuk kesejahteraan, dengan demikian

²⁰ Jochen Ropke, *Koperasi : Teori dan Manajemen*, (Jakarta : Salemba Empat,2003) hal

²¹ Panji Anotaga, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta : PT Rineka Cipta,2007), hal 22

peran koperasi dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu:²²

a. Fasilitator

Fasilitator adalah sekelompok orang yang mendampingi suatu kelompok dalam upaya pencapaian tujuan sehat dengan cara member bantuan serta menyediakan atau memberikan kesempatan fasilitas yang diperlukan suatu kelompok.²³ Menurut Nugrhoho dalam bukunya yang berjudul sukses berkoperasi menyatakan beberapa jenis usaha koperasi unit desa diantaranya :

1. Memberikan pelatihan usaha
2. Menyediakan kegiatan usaha simpan pinjam
3. Mendirikan toko konsumsi
4. Usaha pergudangan

b. Koperasi sebagai motivator

Motivator adalah orang yang berprofesi memberikan motivasi kepada orang lain, motivasi dilakukan dengan cara member pelatihan. Menurut Erna Herlinawati dalam bukunya sekilas tentang mdal dan kemandirian koperasi mengemukakan bahwa koperasi dalam melaksanakan usahanya dihadapkan dengan tugas :

1. Membina para anggota termasuk untuk melayani kepentingan usaha anggota.

²² Muhammad Firdaus dan Agus edhi, *Perkoperasian...*, hal 55

²³ *Ibid.*, hal 58

2. Melaksanakan usaha-usaha yang syah untuk memenuhi kepentingan para anggotanya

Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Bab II Pasal 3 disebutkan tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut mebnagun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁴

Fungsi Koperasi dan Peran Koperasi tercantum dalam UU No.25 Tahun 1992, sebagai berikut ²⁵:

- a. Fungsi koperasi dan peran koperasi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Fungsi kopersasi dan peran untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Fungsi koperasi dan peran koperasi untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar ketentuan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Fungsi koperasi dan peran koperasi untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama yang didasarkan atas kekluargaan demokrasi ekonomi.

²⁴ Panji Anotaga, *Dinamika Koperasi...*, hal 25

²⁵ Herman Suryokumoro dan Hikmatul Ula, *Koperasi Indonesia dalam Era MEA dan Ekonomi Digital*, (Malang : UB Press, 2020), hal 12

Seorang tokoh Kartasapoetra dalam Chaniago menambahkan fungsi koperasi yaitu sebagai berikut :²⁶

- a. Mempersatukan, mengarahkan dan mengembangkan daya kreasi, daya cipta serta daya usaha rakyat, terutama mereka yang serba terbatas kemampuan ekonominya agar mereka dapat turut serta dalam kegiatan ekonomi.
- b. Koperasi bertugas meningkatkan pendapatan dan menimbulkan pembagian yang adil dan merata atas pendapatan tersebut.
- c. Koperasi bertugas mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa Indonesia.
- d. Koperasi berperan serta aktif dalam membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi.
- e. Koperasi berperan serta aktif dalam menciptakan atau membuka lapangan kerja baru.

3. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Banyak defnisi dan pengertian tentang koperasi. Dari akar katanya, koperasi berasal dari Bahasa Latin *coopere* atau *corporation* dalam Bahasa Inggris. Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari kata *Cooperation*. *Co* berarti bersama dan *Operation* artinya bekerja atau berusaha.²⁷ Jadi *Cooperation* adalah bekerja bersama-sama atau

²⁶ Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta : BPFE, 2013), hal 55

²⁷ Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*,(Jakarta :PT Rineka Cipta ,2002),hlm 5.

usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama. Koperasi merupakan suatu system yang merupakan bagian dan saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi dimana artinya koperasi harus bekerja berdasarkan motif ekonomi atau mencari keuntungan.²⁸

Sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi, seperti yang digunakan system pembukuannya yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik dan adanya cadangan. Menurut Rahardja, dilihat dari segi bahasa secara umum koperasi berasal dari kata-kata lain yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja²⁹. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Co* dan *Operation* yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperative Venereging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.³⁰

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perkoperasian adalah Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomo rakyat yang

²⁸ Panji Anotaga, *Dinamika Koperasi...*, hal 75

²⁹ Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM Sebagai Pondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2017, hlm 57-56.

³⁰ *Ibid.*,

berdasarkan azas kekeluargaan.³¹ Usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong selanjutnya dikemukakan bahwa gerakan koperasi adalah perlambangan harapan bagi kaum ekonomi lemah berdasarkan diri sendiri dan tolong menolong diantara anggota-anggota, sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri. Dalam persaudaraan koperasi merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri.

Sedangkan pengertian koperasi menurut Rusdianto adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-rinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya dengan demikian koperasi merupakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian.³² Dari berbagai definisi yang ada mengenai koperasi, terdapat hal-hal yang menyatukan pengertian tentang koperasi, antara lain yaitu ³³:

- 1.) Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan ekonomi yang sama, yang ingin dipenuhi secara bersama melalui pembentukan perusahaan bersama yang dikelola dan diawasi secara demokratis.

³¹ Andjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group,2007),hlm 17.

³² Balai Pustaka. P.N., *Pengetahuan Perkoperasian*, (tp.1981),hlm 114

³³ Hendin Suhendi, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta :Raja Grafindo Persda,2002),hlm 275

- 2.) Koperasi adalah perusahaan, dimana orang-orang berkumpul tidak untuk menyatukan modal atau uang, melainkan sebagai akibat adanya kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi.
- 3.) Koperasi adalah perusahaan yang harus member pelayanan ekonomi kepada anggota.

Dari pengertian tersebut, maka dapat diambil cirri-ciri koperasi antara lain sebagai berikut :³⁴

- 1.) Kekeluargaan, kerjasama serta gotong royong atas kesadaran kebutuhan bersama.
- 2.) Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.
- 3.) Tidak adanya paksaan, ancaman maupun campur tangan pihak lain di dalam keanggotaan koperasi.

b. Sendi dan Landasan Perkoperasian Indonesia

Sendi-sendi dasar perekonomian Indonesia adalah penggerak dari kinerja koperasi, dasar-dasar social yang ada pada koperasi adalah cirri khas yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya. Sendi-sendi dasar ini merupakan esensi dan dasar-dasar kerja koperasi Indonesia sebagai organisasi ekonomi yang berwatak social.³⁵ Dan dasar-dasar bekerja ini merupakan cirri khas dari koperasi dan justru karenanya dapat dibedakan antara koperasi dengan badan ekonomi

³⁴ Panji Anotaga, *Dinamika Koperasi...*, hal 79

³⁵ Nurul Farida dan Suprianto, *Pemodelan Koerasi Wanita Dalam Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Di Kabupaten Blitar*, Akuntabilitas, Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi, Vol 11 No. 1. (Universitas Islam Blitar, Juni , 2018), hal 32

lainnya. Untuk lengkapnya sendi-sendi dasar koperasi Indonesia yang telah ditentukan dalam pasal 6 Bagian 4 UU No.12 Tahun 1967, adalah sebagai berikut :³⁶

- 1.) Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga Negara Indonesia.
- 2.) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai penerimaan demokrasi dalam koperasi.
- 3.) Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota.
- 4.) Adanya pembatasan bunga atas modal.
- 5.) Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 6.) Usaha dan keterlaksanaannya bersifat terbuka.
- 7.) Swadaya, swakerta dan swasembada sebagai pencerminan daripada prinsip dasar percaya pada diri sendiri.

Dalam pelaksanaannya terdapat empat macam landasan koperasi yaitu sebagai berikut :³⁷

- 1.) Landasan Idiil Pancasila

Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah Pancasila.

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Panji Anotaga, *Dinamika Koperasi...*, hal 69

Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa, koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencermin kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan waktu dengan suatu cirri khas adanya unsure ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kegotong royongan dalam arti bekerjasama, saling bantu membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.³⁸

2.) Landasan Struktural UUD 1945

Undang –Undang Dasar 1945 menetapkan Koperasi pada kedudukan sebagai Soko Guru perekonomian nasional. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) ditegaskan kembali bahwa hakikat pembangunan nasional Indonesia seutuhnya dan pembnagunan masyarakat Indonesia Seluruhnya. Hal ini sangat sesuai dengan satu fungsi dan peran koperasi, yaitu mempertinggi kualitas kehidupan manusai dan masyarakat.

3.) Landasan Mental dan Setia Kawan dan Kesadaran Pribadi

Koperasi merupakan organisasi yang paling banyak melibatkan peran serta rakyat. Oleh karena itu, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu lebih banyak diikutsertakan dalam upaya pembangunan, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata, tumbuh dari bawah, berakar di masyarakat dan emndapat dukungan dari rakyat.

³⁸ Hendrojogi, *Teori dan Praktik*,(Jakarta : Rajawali Pers,2015),hlm 35.

4.) Landasan Operasional Pasal 33 UUD 1945, UU Koperasi No.12n Tahun 1967,UU Koperasi NO. 25 Tahun 1992

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Sejak tanggal 21 Oktober 1992, dasar hukum Koperasi Indonesia yang semula UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832 berubah menjadi UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. UU ini disahkan oleh Presiden RI Soeharto, dan diumumkan pada Lembaga Negara RI Tahun 1992 Nomor 16.³⁹

c. Sumber Modal Koperasi

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.

Modal sendiri meliputi sebagai berikut : ⁴⁰

³⁹ Panji Anotaga, *Dinamika Koperasi...*, hal 76

⁴⁰ Ninik wijayanti dan Sunindhia, *Koperasi dan erekonomian Indonesia*,(Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hal 34

1.) Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat bergabung menjadi anggota. Simpanan pokok tidak bisa diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.

2.) Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.⁴¹

3.) Simpanan Khusus/lain-lain

Simpanan sukarela (simpanan yang dapat diambil kapan saja), simpanan Qurban dan deposito berjangka.

4.) Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan sejumlah uang yang diperoleh dari penyesihan Sisa Hasil Usaha yang dimaksud untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.⁴²

5.) Dana Hibah

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Andjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia...*, hal 65

Hibah merupakan sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, modal pinjaman berasal dari pihak-pihak sebagai berikut:⁴³

- 1.) Anggota dan calon anggota
- 2.) Koperasi lainnya dan atau anggota yang dodasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi.
- 3.) Bank dan lembaga keuangan bukan bank lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.) Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.) Sumber lain yang sah.

d. Jenis-Jenis Koperasi

Jenis-jenis koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian didasrkan pada kesamaan kegiatan kepentingan ekonomi anggotanya.⁴⁴ Berdasarkan kondisi dan kepentingan nilai muncul jenis-jenis koperasi:

- 1.) Koperasi Berdasarkan Keanggotaanya

⁴³ Rahayu Diahastuti, *Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Disekitar Pondok Pesantren Assalam..*, hal 43

⁴⁴ Anggota IKAPI, *Undang-Undang Perkoperasian*, (Bandung : Fokusmedia, 2013, hal 10

a) Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa adalah koperasi beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi pedesaan, terutama pertanian. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan KUD antara lain menyediakan pupuk, obat pemberantasan hama tanaman, benih, alat pertanian, dan member penyuluhan teknis pertanian.⁴⁵

b) Koperasi Pegawai Republik Indonesia

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Prgawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota) . KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.⁴⁶

c) Koperasi Sekolah

Kopersi Sekolah memiliki anggota dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah memiliki kegiatan usaha menyediakan kebutuhan warga sekolah, seperti buku pelajaran, alat tulis, makanan dan lain-lain. Kebutuhan koperasi sekolah bukan semata-mata bagi siswa antara lain berorganisasi, kepemimpinan, tanggungjawab dan kejujuran.

2.) Jenis Koperasi Berdasarkan Tingkat dan Luas Daerah Kerja

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ Andjar , *Koperasi Indonesia*,(Jakarta :Kencana Prenada Media Group,2007),hlm 25.

a) Koperasi Primer

Koperasi Primer adalah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

b) Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder merupakan koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan koperasi primer.

3.) Koperasi Berdasarkan Fungsinya

a) Koperasi Konsumsi

Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya.

b) Koperasi Jasa

Fungsinya yaitu untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Tentunya bunga yang ditentukan harus lebih rendah dari pada tempat lainnya.

c) Koperasi Produksi

Bidang usahanya yaitu menjual bahan baku dan peralatan produksi dan juga membantu menjual dan memasarkan hasil produksi tersebut⁴⁷

4.) Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya

a) Koperasi Serba Usaha (KSU)

⁴⁷ Andjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia...*, hal 23

KSU adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, unit wartel.

b) Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya, menyediakan kebutuhan sehari-hari anggotanya. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makan, pakaian perabot rumah tangga.

c) Koperasi Produksi

Koperasi Produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-sama. Anggotanya koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha dan melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran.⁴⁸

d) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah.

e. Struktur Organisasi Koperasi

Struktur adalah kata lain bagan atau “susunan”. Sedangkan istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani “Organon” yang maksudnya alat atau perkakas. Maka organisasi dapat diartikan “Suatu alat yang digunakan

⁴⁸ Ninik wijayanti dan Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia...*, hal 32

dalam rangka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan”. Karena itu struktur organisasi dapat dijelaskan suatu susunan dari alat yang digunakan untuk rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁹

1.) Anggota Koperasi

Keanggotaan Koperasi antara lain :

- a) Orang-Orang
- b) Badan Hukum

Sebagai buktinya, masing-masing harus tercatat didalam “ buku daftar anggota” yang diselenggarakan oleh pengurus berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pejabat.

⁵⁰Keanggotaan ini berdasarakan kepada adanya persamaan kepentingan dalam usaha dengan alasan keanggotaan ini tidak boleh dipindahka. Disamping itu kartu tanda anggotanya adalah berdasarkan pada “atas nama” , oleh karena itu tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Keanggotaan juga tidak dapat secara otomatis berpindah tangan kepada ahli waris kecuali bahwa boleh dipindahkan. Terdapatnya badan hokum koperasi maka padanya melekat beberapa kewajiban hak baik yang diatur dalam perundang-undangan maupun dalam AD/ART.⁵¹

2.) Rapat Anggota

⁴⁹ Karta Sapoerta, *Praktek Pengelolaan Koperasi* , (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003),

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ Hendrojogi, *Koperasi Asaz-Asaz Teori dan praktek*, (Jakarta : Raja Grafindo,2004),hal

Rapat anggota merupakan salah satu “alat perlengkapan organisasi” disamping pengurus dan badan pemeriksa, juga merupakan kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi dimana setiap anggota berhak atas satu suara. Keputusan Rapat Anggota sedapat mungkin diambil berdasarkan permusyawaratan, atau terkendali dengan istilah, mustawarah untuk mufakat.⁵²

3.) Badan Pemeriksaan

Setelah perlimpahan tugas, tanggung jawab dan wewenang dari RA, maka masing-masing penerima limpahan tersebut yang tak lain adalah pengurus dan BP, segera pula menyusun rencana operasionalnya. Pengurus yang bertugas sebagai pelaksana operasional dibidang usaha, organisasi dan tugas yang bersifat memajukan koperasi.⁵³

Sebagai alat perlengkapan organisasi yang tidak kalah pentingnya dan berdiri sejajar dengan pengurus Badan Pemeriksa. Pentingnya keberadaan ini, ditunjukan dalam peraturan perundang-undangan koperasi yang berlaku yang mengatur semua aspek dalam kedudukannya (pada prinsip dapat disebut) sebagai Lembaga Pengawas.⁵⁴

4.) Pengurus

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Karta Sapoerta, *Praktek Pengelolaan Koperasi...*, hal 55

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. Dalam praktiknya mungkin anggota yang berhak dipilih tidak selalu mempunyai keahlian serta kemampuan manajemen. Kondisi seperti ini membuka kemungkinan untuk menunjuk pengurus yang bukan anggota koperasi. Pengangkatan pengurus yang bukan berasal dari anggota sendiri seperti ini hanya bersifat temporer. Koperasi berkewajiban menyiapkan mendidik dan melatih calon pengurus yang berasal dari anggota koperasi.

5.) Dewan Penasehat

Rapat Anggota dapat membentuk penasehat demi kepentingan koperasi pada umumnya. Pengurus pada khususnya. Untuk keperluan ini dapat diangkat Dewan Penasehat yang anggotanya berasal dari organisasi koperasi sesuai dengan keahlian. Para anggota Dewan Penasehat ini tidak diberi gaji kecuali hanya berupa honorarium yang diusulkan pengurus dan disetujui Rapat Anggota. Disamping itu Dewan Penasehat juga tidak menerima hasil dari SHU dan tanpa hak suara baik dalam Rapat Anggota dan RAT. Tugas utama Dewan Penasehat adalah mengajukan saran yang berguna bagi upaya pengurus mengatasi persoalan dalam kegiatan sehari-hari.

4. Pemberdayaan Perempuan

a. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan yaitu suatu usaha mengalokasikan kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Posisi perempuan akan membaik ketika perempuan dapat mandiri dan mampu

menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya.

Menurut Tiskon pemberdayaan perempuan yaitu memberi kesempatan dan mendorong individu untuk mengambil bagian dan tanggungjawab baik perorangan ataupun kelompok guna meningkatkan kemampuan dalam memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi.⁵⁵ Pemberdayaan perempuan merupakan cara yang dapat ditempuh dengan menggali dan mengembangkan potensi perempuan agar berkualitas dan produktif sebagai langkah awal untuk memberikan kesempatan mengambil tanggungjawab guna meningkatkan dan memberikan kontribusi organisasi.

Untuk meningkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan bagi perempuan dapat dilakukan dengan cara memberdayakan kaum perempuan yang lemah dan menciptakan hubungan yang lebih adil, serta antara laki-laki dan perempuan serta mengikut sertakan perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan upaya optimalisasi potensi perempuan secara umum dengan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam masyarakat dan

⁵⁵ Julia Moss, *Gender dan Pembangunan*, (Bandung : Pustaka Belajar,2000), hal 77

pemerintah agar dapat berkontribusi penuh terhadap pembangunan di Daerah.

Sulaiman Asang menyebutkan bahwa pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan paradigma baru pembangunan untuk memberdayakan perempuan dengan cara membangun daya melalui :

a. Memotivasi

Memotivasi perempuan dalam proses pemberdayaan perempuan adalah mendorong menumbuhkan semangat untuk mempermudah melakukan kegiatan pengembangan diri, agar dapat menggunakan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki.

b. Menggali Potensi

Menggali potensi dalam pemberdayaan merupakan kebutuhan fisik untuk meningkatkan kualitas diri, potensi menekan pada proses meningkatkan kemampuan, mendorong untuk dapat menentukan pilihan hidup merupakan upaya untuk memandirikan dan menyetarakan kaum perempuan (gender).

c. Membangkitkan Kesadaran Potensi yang Dimiliki

Pendekatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan kesadaran untuk keterlibatan mengorganisir diri agar lebih baik dari sebelumnya. Metode pada pemberdayaan perempuan bukanlah sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar atau

menyediakan mekanisme pencegahan proses pemikiran lebih lanjut. Paradigma pemberdayaan perempuan menuntut pendekatan yang tidak memposisikan perempuan sebagai objek dari berbagai aksi pembangunan tetapi harus menempatkan perempuan sebagai subjek kegiatan.

Ketika perempuan diberdayakan dan dapat meraih hak mereka serta akses keranah kepemimpinan, kesempatan dan pilihan, ekonomi berkembang keamanan pangan meningkat dan prospek meningkat bagi generasi saat ini dan masadepan. Pada awal perkembangan wanita memang selalu diposisikan pada wilayah domestic dimana seorang wanita harus berada dirumah mengurus suami dan anak sehingga muncul konsep wanita yang baik atau sempurna adalah wanita yang dapat menjadi istri dengan baik dan penuh pengabdian melayani suami dan juga menjadi pendidikan anak-anak mereka agar dapat menjadi anak yang bermanfaat bagi masyarakatnya.

Inilah yang selalu ditanamkan pada wanita sepanjang hidupnya bahkan telah direproduksi dalam berbagai bentuk kursus yang menjadi kekuatan penting dalam menyadarkan wanita tentang peran penting domestic mereka. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perayaan hari ibu yang menegaskan betapa penting dan mulianya peran seorang ibu, demikian juga peringatan hari kartini yang awalnya merupakan perlambangan perlawanan kaum wanita, saat

ini telah merubah maknanya. Dengan perkembangan jaman saat ini, dimana wanita sudah mulai merambah kewilayah publik, tentunya ada banyak perubahan pada sistem sosial masyarakat.

Seperti adanya pembagian peran dalam mengurus anak, bahkan peran wanita sebagai seorang ibu yang berhak untuk melahirkan dapat terabaikan dan terkadang hak-hak wanita seperti hak cuti melahirkan terabaikan pula karena hal itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Bukan hanya itu saja tetapi terjadi pula pengambil alihan sector-sektor yang awalnya dikuasai wanita oleh laki-laki. Hal ini terjadi ketika kesempatan kerja bagi laki-laki mulai berkurang, kemudian mereka mulai mengambil alih atau melakukan ekspansi ke sektor-sektor yang semua ditangani oleh wanita.

Hal lain juga terjadi ketika wanita mulai merambah kesektor publik, tetap laki-lakilah yang diutamakan, dan jika peluang laki-laki terbatas maka mereka akan melakukan marginalisasi terhadap wanita.⁵⁶ Diskriminasi terhadap perempuan yang paling mendasar dalam pencapaian kesetaraan antara perempuan dan laki-laki pada berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, hukum dan sosial adalah legalisasi negara atas pembakuan gender dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Walaupun biasanya pencari nafkah bagi keluarga adalah suami, tetap saja program

⁵⁶ Prijono Pranarka, *Konsep, Pemberdayaan, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta : CSII,2000), hal 120

pemberdayaan apapun untuk keluarga biasanya ditujukan pada perempuan.

5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “*empower*” yang mempunyai makna dasar “pemberdayaan” dimana “daya” berarti kekuatan atau kemampuan. Menurut Sulistiyani mengatakan bahwa :⁵⁷ “Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberdayaan atau kekuatan atau kemampuan dari pihak yang mempunyai daya yang tidak atau kurang berdaya”⁵⁸ Berdasarkan teori diatas, pemberdayaan merupakan suatu proses merubah suatu keadaan dimana perubahan tersebut membawa dampak dan pengaruh besar bagi keadaan masyarakat menjdai lebih maju.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya dalam memberikan kemampuan sekaligus memberikan keahlian serta ketrampilan dalam mewujudkan inovasi-inovasi yang dibentuk di masyarakat. Selain itu pemberdayaan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan

⁵⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kmaus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm 245.

perubahan dalam lingkungan. Pembangunan diartikan sebagai perubahan masyarakat tradisional menuju kearah perkotaan.

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu proses memberikan bekal pendidikan masyarakat dalam jangka panjang. Pemberian pendidikan kepada masyarakat berperan untuk menciptakan inovasi dan ketrampilan. Dari odal ketrampilan daoat memberikan peluang bagi masyarakat dalam menciptakan ekonomi kreatif. Pemberian ketrampilan dan inovasi bagi masyarakat salah satu cara dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengadaan perubahan secara bertahap di lingkungan.

Dalam konteks ini pemberdayaan ekonomi untuk penguatan masyarakat dalam mendapatkan gaji/upah yang memadai, guna memperoleh informasi,pengetahuan dan ketrampilan, sehingga memperoleh peningkatan hasil secara ekonomi⁵⁹. Pemberdayaan dibidang ekonomi yaitu upaya untuk membangun kesadaran daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta beberapa upaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

⁵⁹ Mardi Yatmo Hutomo,*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi*,(Yogyakarta: Adiyana Press,2000),hlm 3

Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional.⁶⁰ Dalam kaitan pemberdayaan ekonomi masyarakat berarti segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan kesehatan dan pendidikan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anggota keluarga merupakan bentuk potensi masyarakat yang digunakan untuk berpartisipasi pada pendidikan.⁶¹

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan factor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan ketrampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu berdiri sendiri untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri, meningkatkan kualitas hidup, mencapai kesejahteraan dan memperbaiki kedudukan dalam masyarakat.

b. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

- 1.) Pemberdayaan dilakukan dengan cara demokrasi dan menghindari unsur paksaan. Unsur-unsur paksaan melalui berbagai cara perlu dihindari karena bukan merupakan cirri-ciri dari perbedayaan.

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ *Ibid.*,

- 2.) Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan oleh karena itu sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan pendekatan dan bentuk aktivitas pemberdayaan.
- 3.) Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu sehingga dilakukan secara bertahap dan berkembang. Tahapan ini dilakukan secara logis dari yang sifatnya sederhana menuju yang komplek.
- 4.) Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu sebagai potensi besar dalam mendorong kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan.
- 5.) Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya, oleh karena itu diperlukan berbagai metode dan pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi lapangan.
- 6.) Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat mulai dari unsur pemerintah, tokoh, LSM, relawan dan anggota masyarakat. Semua pihak tersebut dilibatkan sesuai peran, potensi dan keterampilan masing-masing.

c. Pendekatan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam melakukan pemberdayaan, perlu adanya suatu strategi pendekatan kepada masyarakat. Menurut Suharto pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui SP yaitu :⁶²

- 1.) Pemungkinan yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan structural yang menghambat.
- 2.) Perlindungan yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang.
- 3.) Penguatan yaitu memperkuat pengetahuan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.
- 4.) Penyokongan yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam yang semakin lemah dan terpinggirkan.

⁶² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008),hal 62

5.) Pemeliharaan adalah memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antar berbagai kelompok dan masyarakat.

Sedangkan menurut Noeng Muhadjir dalam Yoyon Suryono menyebutkan bahwa, dalam menempatkan kualitas manusia sebagai objek pengembangan sumber daya manusia dengan dua indikator, yaitu indikator instrumental dan indikator substansial.⁶³ Indikator instrumental meliputi kreativitas, kebebasan, tanggung jawab dan kemampuan produktif. Indikator substansial meliputi aspek social, politik, agama, ekonomi, budaya, ilmu dan fisik. Keduanya dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan kualitas manusia. Secara substansi, keberhasilan pengembangan kualitas manusia diunjukkan dalam bentuk pendapatan, pendidikan, kesehatan, keimanan, ketangguhan fisik, ketangguhan mental dan seni.

Tujuan akhir pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah meningkatkan pendapatan masyarakat lemah. Pendapatan masyarakat pada umumnya berasal dari upah/gaji dan dari surplus usaha. Pendapatan umumnya masyarakat yang tunadaya (tidak berkemampuan) secara ekonomi hanya menerima gaji/upah rendah. Rendahnya gaji/upah yang diterima masyarakat tunadaya ini disebabkan karena mereka pada umumnya memiliki ketrampilan yang terbatas.⁶⁴

⁶³ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993), hlm 17

⁶⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 3.

d. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu membantu masyarakat mengembangkan masyarakat yang lemah, miskin, tidak memiliki pekerjaan dan ketrampilan. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bisa ditangani dengan pemberdayaan. Dalam pemberdayaan diperlukan partisipasi, serta sinergitas dari berbagai pihak dengan peran suatu pemangku kepentingan atau stakeholders.⁶⁵

Pemberdayaan secara sosial salah satu sarana dalam mengadakan perubahan baik di tatanan lingkungan, dan peningkatan ekonomi, selain itu dapat memberikan dorongan partisipasi masyarakat dalam melakukan pergerakan untuk mencapai tujuan yang akan membawa masyarakat terjun langsung dalam aktifitas yang dapat menumbuhkan potensi.⁶⁶ Tujuan yang dicapai dari pemberdayaan adalah membentuk individu atau kelompok masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut diantaranya inovasi, tanggap terhadap masalah pendirian usaha yang akan melahirkan ekonomi kreatif. Tujuan dari pemberdayaan salah satu hal dalam menciptakan keadilan social dan memberikan solusi kepada masyarakat dengan wujudnya persamaan politik dan social, dan upaya saling membantu melalui langkah-langkah tertentu guna mencapai tujuan yang lebih baik.⁶⁷

⁶⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.*, hal 65

⁶⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.* (Bandung:Refika Aditama, 2014), hlm 59.

⁶⁷ *Ibid.*,

e. Pola-Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan. Bentuk yang tepat sasaran dalam pemberdayaan adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Beberapa bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat antara lain :⁶⁸

1.) Bantuan Modal

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuadaya adalah permodalan. Lambatnya akumulasi capital di kalangan pengusaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu penyebab lambatnya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha disektor usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah:⁶⁹

- a.) Pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat
- b.) Pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan.

2.) Bantuan Pembangunan Prasarana

⁶⁸ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, (Yogyakarta, Aditya Media, 1997), hlm 34.

⁶⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat...*, hal 76

Usaha mendorong produktivitas dan tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau dapat dijual hanya dengan harga yang sangat rendah. Oleh sebab itu, komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi.

3.) Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendampingan ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar.

4.) Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan. Oleh sebab itu pendekatan yang dilakukan sebaiknya dengan pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi capital sulit dicapai dikalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi capital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama.⁷⁰ Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin

⁷⁰ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Jakarta : Gava Media,2005), hal 9

mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.⁷¹

5.) Pembangunan Kemitraan Usaha

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya akan ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.⁷²

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi dasar ketika melaksanakan sebuah penelitian. Karena penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai sumber inspirasi yang nantinya membantu pelaksanaan penelitian. Selain itu peneliti juga memeriksa apa yang kurang dan kelebihan untuk dikembangkan.

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat...*, hal 32

Penelitian Rosnani Siregar (2015), dengan judul Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki kesamaan dengan ekonomi islam, prinsip dasar koperasi adalah kerjasama, gotong royong dan demokrasi ekonomi, menuju kesejahteraan umum. Islam juga menekankan kerjasama dan tolong menolong (*ta'awun*), persaudaraan (*ukhwah*) dan pandangan hidup demokrasi (*musyawarah*) sebagaimana dealamQS. Al-Maidah Ayat 2. Kesejahteraan ekonomi ini dilihat dari bagaimana koperasi mampu memberikan peranan yang besar baik dari sisi internal maupun eksternal.⁷³

Putri Puspita (2014), dengan judul Peran Koperasi Berkah Mentari Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Masyarakat Pamulang Kota Tangerang Selatan. ⁷⁴Hasil dari penelitian ini bahwa untuk meningkatkan usaha mikro yang dilakukan oleh Koperasi Berkah Mentari yaitu dengan cara memberikan pinjaman modal usaha berjalan dengan baik, peran yang dijalankan oleh koperasi melalui tahap persiapan yang dilakukan dengan pemberian edukasi terhadap pegawai mengenai hal yang akan diampaikan kepada nasabah. Tahap pembiayaan (peminjaman modal usaha). Manfaat peminjaman modal usaha bagi nasabah sebagai upaya peningkatan usaha mikro yang dilakukan dari kepuasan mereka yang sudah lebih dari satu tahun melakukan peminjaman modal usaha.

⁷³ Rosnani Siregar, *Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam*, At-Tijarah Volume1, Thn 2015, hlm5

⁷⁴ Putri Puspitasari, *Peran Koperasi Berkah Mentari Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Pada Masyarakat Pamulang*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm 23

Jumariyah (2017), dengan judul penelitian Strategi Pemberdayaan Perempuan Melalui Koperasi Wanita Krido Mulyo Di Dusun Joho. Penelitian ini menjelaskan yaitu pertama, strategi pemberdayaan ekonomi yang mengacu pada pendekatan pengentasan kemiskina melalui koperasi yang berfungsi membangun dan mengembangkan potensi untuk mensejahterakan masyarakat dari segi ekonomi ataupun social. Kedua, hasil yang dicapai oleh masyarakat dusun Joho dari pemberdayaan perempuan yaitu dalam segi social terjadinya tali silaturahmi antar warga, tumbuhnya rasa social, tidak merasa minder ataupun malu ketika berkumpul dengan orang lain dan ketika mengajukan pendapat.

Akbar Syarifudin (2020), dengan judul penelitian Peranan Koperasi Unit Desa Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dibiidang Pertanian Desa Mulyo Asih Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin.⁷⁵ Hasil dari penelitian ini yaitu peranan KUD Mulyo Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat/anggota sangat penting dan membantu dalam berbagai kebutuhan anggotanya seperti, pemberi pinjaman untuk kebutuhan sekolah, pemberian pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari. Strategi yang dilakukan KUD Mulyo Mandiri Asih untuk meningkatkan ekonomi umat/anggota yaitu dengan mengembangkan usaha, meningkatkan perkembangan SHU, perkembangan jumlah modal koperasi. Koperasi dalam Islam disebut syirkah yang berarti juga Musyarakah yaitu kerja sama diantara

⁷⁵ Akbar Syarifudin, *Peranan Koperasi Unit Desa Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dibiidang Pertanian Desa Mulyo Asih Kecamatan Keluang*, (Jambi: UIN Sultan Thaha Saifudin, 2020), hlm 17

para pemilik modal yang mencantumkan modal mereka untuk tujuan mencapai keuntungan.

Himawan Arifianto (2015) ,dengan judul penelitian Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Efektivitas Kredit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa koperasi memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Upaya yang dilakukan yaitu koperasi tidak hanya memberikan kredit naun juga demikian juga memberikan pendampingan dalam rangka untuk memanfaatkan penggunaan kredit yang diberikan. Sedangkan kedua hasil analisis efektivitas kredit yang diberikan koperasi adalah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan efektif.⁷⁶ Hasil tersebut dapat dikatakan bahwa anggota koperasi merasakan sosialisasi dan transparansi informasi produk-produk koperasi sehingga dapat memahami secara maksimal terkait produk yang ditawarkan oleh koperasi.

Tabel 2.1

Tabel Persamaan Dan Perbedaan Penelitian

NO	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Rosnani Siregar, Studi Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam.	Penelitian sebelumnya dan penelitian yang saat ini dikaji sama-sama membahas bagaimana peran koperasi dalam meberdayakan ekonomi masyarakat.	Untuk perbedaannya dimama untuk peneliti sebelumnya focus terhadap prran koperasi menurut hukum islam sedangkan untuk penelitian yang akan

⁷⁶ Lincoln, Arsyad. *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2004), hlm 9

			dikaji fokus terhadap peran koperasi dalam lingkup umum.
2	Putri Puspita, Studi Peran Koperasi Berkah Mentari Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Masyarakat Pamulang Kota Tangerang.	Peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan dikaji sama-sama membahas faktor-faktor dalam peran koperasi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.	Perbedaannya yaitu untuk penelitian terdahulu hanya membahas peran dan faktor pemberdayaan ekonomi masyarakat, sedangkan penelitian yang akan dikaji membahas peran, faktor serta strategi dalam menghadapi hambatan.
3	Jumariyah, Studi Strategi Pemberdayaan Perempuan Melalui Koperasi Wanita Krido Mulyo Di Dusun Joho.	Untuk persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dikaji yaitu sama-sama membahas pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal, pembinaan usaha, dan pelatihan kerja.	Untuk perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dikaji yaitu penelitian terdahulu membahas tentang pemberdayaan perempuan sedangkan penelitian yang akan dikaji hanya membahas pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4	Akbar Syarifudin, Peranan Koperasi Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Bidang Pertanian Desa Mulyo Asih Kecamatan Keluang Kabupaten Banyuwangi.	Dalam persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang peran adanya koperasi Koperasi, selain itu persamaannya adalah dalam penelitiannya sama-	Untuk perbedaannya, pada penelitian terdahulu hanya fokus pemberdayaan ekonomi dibidang pertanian saja, sedangkan untuk penelitian yang akan diteliti fokus terhadap

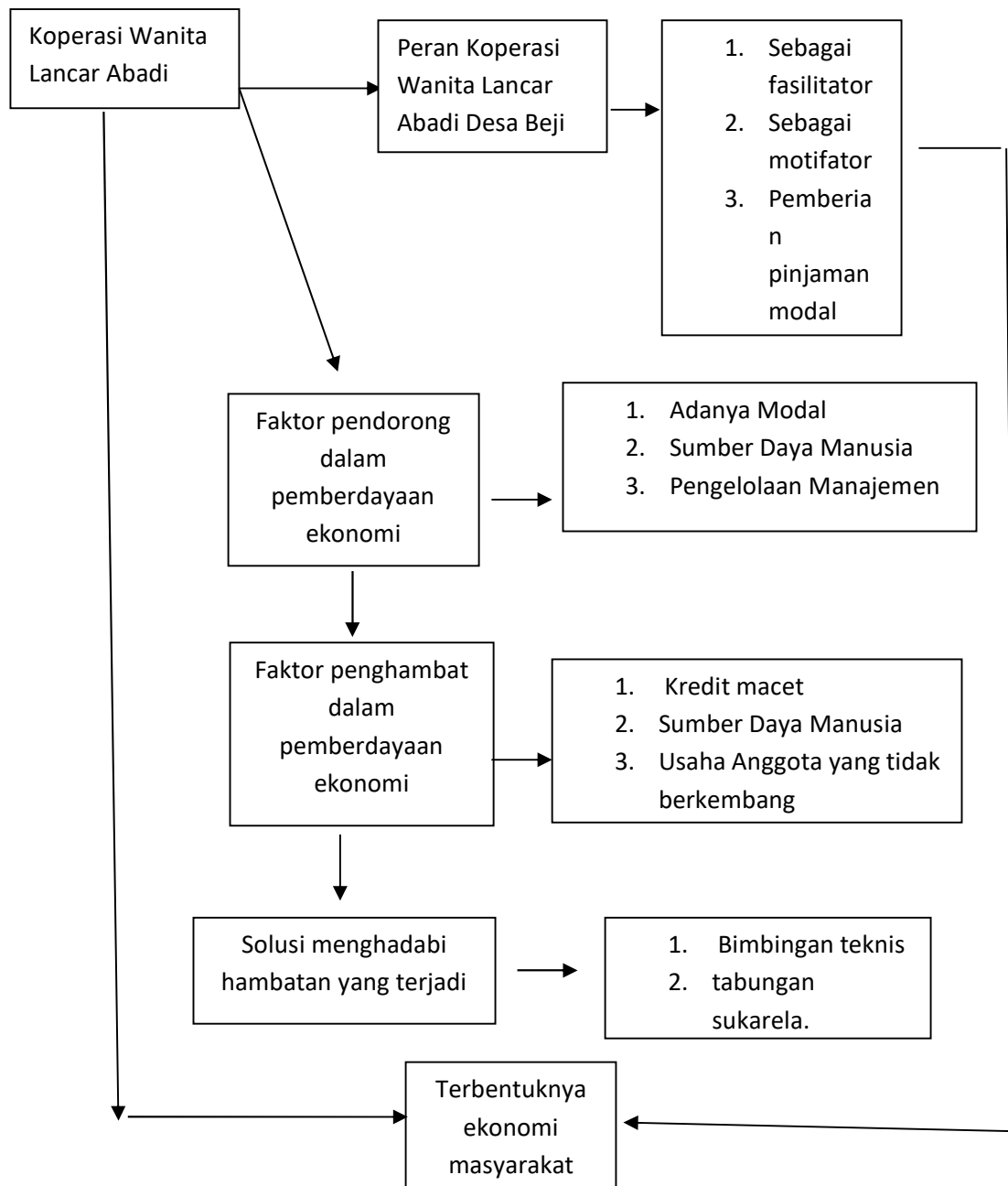
		sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.	pemberdayaan ekonomi disemua bidang dan tidak focus pada satu bidang saja.
5	Himawan Arifianto, Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Efektivitas Kredit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota.	Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti sama-sama membahas tentang pemberdayaan ekonomi dan peran adanya koperasi.	Perbedaa anatara peneliti terdahulu dan penelitian yang akan diteliti yaitu pada penelitian pterdahulu juga membahas tentanf efektivitas kredit pada koperasi, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti hanya membahas opemberian pinjaman untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

C. Kerangka Berfikir

Pada kerangka berfikir ini menjelaskan tentang cara berfikir peneliti dalam melakukan penelitian yang berjudul Peran Koperasi Wanita Lancar Abadi Dalam Perbedayaan Ekonomi Masyarakat Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Dalam penelitian ini berfokus bagaimana peran Peran Koperasi Wanita Lancar Abadi yang ada di Desa Beji, dan apa saja faktor pendorong dan juga faktor penghambat dalam pencapaian pemberdayaan ekonomi masyarakat desa Beji serta bagaimana strategi Koperasi

Wanita Lancar Abadi dalam menghadapi hambatan dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Beji.

Gambar 3.1

Kerangka Berfikir Peneliti⁷⁷

⁷⁷ Hasil Temuan Peneliti di Koperasi Wanita Lancar Abadi Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung Pada Tanggal 22 Juli Pukul 11.00.